

# Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Arini<sup>1\*</sup>, Zulvianira Loekman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, 28265, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Pekanbaru, Riau, 28294, Indonesia

<sup>1\*</sup>[arini@unilak.ac.id](mailto:arini@unilak.ac.id), <sup>2</sup>[048361961@ecampus.ut.ac.id](mailto:048361961@ecampus.ut.ac.id)

## Abstract

*Regional governments are obliged to prepare Regional Government Financial Reports (LKPD) as a form of accountability for regional financial management. One component of the LKPD is the Budget Realization Report (LRA) which contains a number of financial information. This research aims to measure the financial performance of the Trenggalek Regency Government through analysis of the Trenggalek Regency Government's LRA for the 2020 - 2022 fiscal year. This research uses a quantitative descriptive analysis method by observing a number of financial ratios. The financial ratios observed in this research include the regional financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and regional spending harmony ratio (activity ratio). The regional expenditure compatibility ratio consists of the compatibility ratio of operating expenditure to regional expenditure and the compatibility ratio of capital expenditure to regional expenditure. The results of the analysis show that the financial performance of the Trenggalek Regency Government for the 2020 - 2022 Fiscal Year based on the financial independence ratio has very low financial capacity and has an instructive relationship pattern. Based on the PAD effectiveness ratio, the Trenggalek Regency Government's financial performance is included in the quite effective category. Based on the efficiency ratio in obtaining PAD, the Trenggalek Regency Government is classified as very efficient. Meanwhile, according to the regional expenditure harmony ratio, the Trenggalek Regency Government tends to prioritize operational or routine expenditure over capital expenditure.*

**Keywords:** Budget Realization Report, Financial Performance, Financial Ratios

## 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah, sebagai entitas otonom, tetap mengikuti peraturan pemerintah pusat dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu tanggung jawab urusan pemerintahan kabupaten/kota. Salah satu aturan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan undang-undang lainnya yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. APBD sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Selain menyusun APBD, pemerintah daerah juga menatausahakan penerimaan dan pengeluaran daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga berkewajiban melaporkan keuangan daerah yang dikelolanya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan anggaran dan belanja yang telah disusun dalam APBD. LKPD memiliki sejumlah informasi keuangan yang dapat dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen LKPD yang dapat dilakukan analisis lebih lanjut. LRA merupakan laporan yang menyajikan ringkasan sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan (Fitra, 2019).

Sementara itu, analisis rasio keuangan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisis LRA. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menentukan hubungan atau keseimbangan antara dua angka atau lebih adalah rasio keuangan (Muhammad Ichlasul & Puji Wibowo, 2022). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis LRA antara lain, rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Rasio kemandirian daerah menunjukkan seberapa bergantung daerah pada dana ekstern. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur besarnya biaya pemungutan untuk memperoleh realisasi pendapatan (Amrie Firmansyah & dkk 2015). Dan rasio aktivitas untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Alhabsi dkk (2023) dengan judul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021 mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019 dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas realisasi pendapatan asli daerahnya yang masih belum maksimal. Kemudian, pada tahun 2020-2021 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang mampu mencapai penerimaan PAD sesuai target dengan tingkat efektifitas diatas 100%. Kriteria kinerja dan anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2019-2021 dinilai cukup efisien. Temuan perhitungan rasio efisiensi yang menunjukkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan

Aset Daerah Kabupaten Magelang cukup efisien dalam menggunakan anggaran belanja sesuai tujuan dengan tingkat efisiensi kurang dari 100%.

Kemudian berdasarkan penelitian Dien dkk (2015) dengan judul Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mengatakan bahwa tingkat dan kriteria efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif dari tahun ke tahun. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektifitas diatas 100%. Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009 – 2013 secara keseluruhan kurang efisien dari tahun ke tahun. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Kota Bitung kurang mengefisienkan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

Salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan asas desentralisasi di Provinsi Jawa Timur ialah Kabupaten Trenggalek. Penerapan asas desentralisasi diharapkan dapat memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 40 unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang tersusun dari 26 badan/dinas dan 14 kecamatan. SKPD di Kabupaten Trenggalek sebagai entitas akuntansi akan menyusun laporan keuangan SKPD yang kemudian akan dikonsolidasikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, sebagai entitas pelaporan, untuk menjadi LKPD Kabupaten Trenggalek. Sebagai gambaran umum, berikut anggaran beserta realisasi dari

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Trenggalek TA 2020 – 2022.

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Trenggalek TA 2020-2022**

Tahun	Pendapatan Trenggalek	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2020	1.808.114.315.310,64	1.739.648.953.239,71
2021	1.832.271.419.060,00	2.037.316.529.779,00
2022	2.043.554.187.495,00	2.420.666.082.302,00

Sumber: LRA Pemkab Trenggalek

**Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Trenggalek TA 2020-2022**

Tahun	Pendapatan Trenggalek	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2020	1.831.177.618.127,90	1.861.988.825.777,28
2021	1.859.926.435.396,71	1.840.127.791.074,27
2022	2.046.436.048.932,63	2.167.412.235.228,31

Sumber: LRA Pemkab Trenggalek

Pada tabel 1, baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk TA 2020 – 2022 mengalami peningkatan. Dalam tabel terlihat peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022. Pendapatan 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,53%, untuk belanja terdapat kenaikan sebesar 18,82%, Adapun tabel 2 menggambarkan kondisi realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Trenggalek pada TA 2020 – 2022. Dari sisi pendapatan, terlihat tren peningkatan pendapatan dengan kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 10,03%. Jika ditilik dari sisi belanja, terjadi penurunan belanja pada tahun 2021 dan peningkatan belanja sebesar 17,79% untuk tahun 2022. Sektor-sektor strategis sebagai penerimaan PAD Kabupaten Trenggalek bersumber dari pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan.

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, penulis akan melakukan analisis terhadap LRA dengan menghitung melalui rasio-rasio keuangan yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya. Setelah melakukan analisis LRA, diharapkan dapat terlihat tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurus sumber daya keuangan yang dimilikinya. Selain itu, hasil dari analisis yang dilakukan juga dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan terkait pengendalian dan evaluasi atas kegiatan Pemerintah Daerah

yang sedang dilaksanakan serta keputusan terkait perencanaan kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

Sehubungan dengan pentingnya analisis LRA melalui rasio keuangan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah melalui perspektif keuangan, maka penulis akan mengambil judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020-2022” dalam penyusunan Karya Ilmiah ini.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau memberikan penjelasan dari suatu hasil penelitian. Adapun dalam penelitian kuantitatif, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, hingga penyajian hasil banyak menggunakan angka dalam bentuk grafik maupun tabel yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian (Priadana & Sunarsi, 2021). Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan hasil dari pengolahan data angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah :

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan modul untuk memperoleh pemahaman, teori dan konsep mengenai permasalahan yang akan dibahas

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, berupa laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2020 – 2022 dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dapat diakses melalui

<https://trenggalekkab.go.id/Article/transparansi>.

### 2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini berupa perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan. Berikut penjelasan dari rasio-rasio keuangan yang akan digunakan :

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus rasio ini diperoleh dari membandingkan realisasi PAD dengan sumber dana ekstern. Sumber dana ekstern terdiri dari bantuan pemerintah atau pendapatan transfer dan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman. Semakin tinggi angka rasio maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana dari pihak eksternal. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi angka rasio juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Berikut cara memperoleh rasio kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \quad (1)$$

hasil dari perhitungan rasio kemandirian akan menunjukkan kriteria untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat dikategorikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Keterangan:

- Instruktif, menunjukkan peranan pemerintah pusat yang lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- Konsultif, menunjukkan peran campuran dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan keuangan pemerintah daerah meningkat.

- Partisipatif, menunjukkan peran pemerintah pusat lebih banyak berkurang mengingat kemampuan keuangan pemerintah daerah meningkat.
- Delegatif, menunjukkan peranan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

#### 2. Rasio Efektivitas

Rasio ini mendeskripsikan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan (PAD) yang sudah diproyeksikan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik dalam melihat potensi PAD. Berikut cara menghitung rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Adapun kriteria efektivitas keuangan daerah ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

Efektifitas Keuangan Daerah	Rasio Efektifitas
Tidak Efektif	<75%
Kurang Efektif	75% - 89%
Cukup Efektif	90% - 99%
Efektif	100%
Sangat Efektif	>100%

#### 3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan proporsi pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang diterima dibandingkan dengan besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Biaya atau belanja yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD diperoleh dari rincian di belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran. Berikut perhitungan rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Adapun kriteria tingkat efisiensi keuangan daerah ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Efektifitas Keuangan Daerah	Rasio Efektifitas
Tidak Efektif	>30%

Kurang Efektif	21% - 30%
Cukup Efektif	11% - 20%
Efektif	5% - 10%
Sangat Efektif	<5%

#### 4. Rasio Keserasian Belanja Daerah (Aktivitas)

Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengatur dana untuk belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Secara umum, dapat dilihat bahwa semakin banyak dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin sedikit dana yang dialokasikan untuk investasi, atau belanja pembangunan, untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Sebaliknya, jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan cenderung semakin kecil. Cara menghitung rasio keserasian belanja adalah dengan menyandingkan dua jenis belanja: rasio keserasian belanja operasi terhadap belanja daerah dan rasio belanja modal terhadap belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% (4)$$

### 2.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 2.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak menganggarkan penerimaan pinjaman daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan transfer dan pinjaman pada tahun 2020 hanya berisikan besaran pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020. Untuk kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 berada di angka 17,09. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berada di kriteria rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif.

**Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kab. Trenggalek TA 2020 – 2022**

TA	PAD	Pendapatan Transfer dan Pinjaman	Rasio (%)	KK	PH
2019	285.134.071.594,78	1.639.283.770.941,00	17,39	RS	Inst
2020	257.977.450.483,90	1.509.803.189.389,00	17,09	RS	Inst
2021	233.490.679.200,57	1.574.625.383.475,14	14,83	RS	Inst
2022	422.488.717.357,63	1.806.419.149.730,00	23,39	RS	Inst
<b>Rata-Rata</b>			<b>18,43</b>	<b>RS</b>	<b>Inst</b>

Catatan: KK: Kemampuan Keuangan, RS: Rendah Sekali, PH: Pola Hubungan, Inst: Instruktif

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019 – 2022

Selanjutnya, PAD pada tahun 2021 mengalami penurunan namun pendapatan transfer pada tahun 2021 mengalami peningkatan dan pada tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga menganggarkan pinjaman daerah. Sehingga total pendapatan eksternal (pendapatan transfer ditambah dengan pinjaman) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak ke perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2021 yang menghasilkan angka 14,83. Rasio kemandirian keuangan daerah turun dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, PAD Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan jumlah PAD pada tahun 2021. Namun pendapatan transfer untuk tahun 2021 juga meningkat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga kembali menerima pinjaman daerah. Sehingga, ketika dilakukan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2022 menunjukkan angka 23,39. Meskipun angka rasio menunjukkan kenaikan, namun kondisi kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih berada di kategori rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif. Dari perhitungan pada tabel 6, dapat diketahui bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2020 – 2022 berada di angka 18,43. Angka tersebut berdasarkan tabel 3, berada di rentang nilai 0 – 25% yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berada di kriteria rendah sekali dan termasuk ke dalam kategori pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan

tingginya tingkat dependensi Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap pihak eksternal. Dominasi pihak eksternal terhadap total pendapatan menunjukkan Kabupaten Trenggalek masih jauh dari mandiri dalam hal sumber dana keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rendahnya tingkat kemandirian disebabkan oleh masih tingginya sumber pendanaan dari pendapatan transfer dan pinjaman serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyumbang PAD melalui pembiayaan pajak dan retribusi. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Kota Bitung kurang mengefisiensikan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

**2.1.2 Rasio Efektivitas**

Dari tabel 7 , dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan jumlah PAD yang dianggarkan. Ketika dibandingkan antara realisasi PAD dengan anggarannya, diperoleh rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencapai angka 100,53. Angka ini dikelompokkan ke kategori sangat efektif. Untuk tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menargetkan PAD tidak berbeda jauh dengan target PAD pada tahun 2021. Namun jumlah realisasi PAD pada tahun 2021 tidak mencapai target, bahkan realisasi PAD tahun 2021 lebih rendah dibandingkan realisasi PAD pada tahun 2020. Sehingga rasio efektivitas PAD 2021 memperoleh angka 90,88 dengan kriteria cukup efektif.

**Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Kab. Trenggalek TA. 2020 – 2022**

TA	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)	EK
2019	299.160.127.721,35	285.134.071.594,78	95,31	CE
2020	256.605.156.975,64	257.977.450.483,90	100,53	SE
2021	256.928.432.907,00	233.490.679.200,57	90,88	CE
2022	412.882.874.335,00	422.488.717.357,63	102,33	SE
Rata – rata			97,91	CE

Catatan: EK: Efektivitas Keuangan, SE: Sangat Efektif, CE: Cukup Efektif  
 Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019 – 2022

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek meningkatkan jumlah anggaran PAD untuk tahun 2022. Dan jumlah realisasi PAD tahun 2022 melebihi jumlah capaian yang ditetapkan. Sehingga diperoleh angka 102,33 untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2022. Angka ini masuk ke kategori sangat efektif. Secara keseluruhan, rasio efektivitas selama tahun 2020 – 2022 mengalami naik turun namun masih berada di atas 90%. Dari perhitungan pada tabel 7, dapat diperoleh rata-rata rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk tahun anggaran 2020 – 2022 berada di angka 97,91. Berdasarkan tabel 4, angka pada rasio ini dikategorikan ke kelompok cukup efektif dengan rentang nilai 90 – 99%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam merealisasikan PAD berdasarkan target potensi riil PAD sudah mendekati efektif.

Mardiasmo dalam Pangkey & Pinatik, (2015), mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sedangkan Faud (2016), mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu mempertahankan kinerja pencapaian realisasi PAD seperti di tahun 2022. Bahkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga dapat lebih menggali potensi penerimaan PAD melalui sumber-sumber PAD lainnya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi sektor perpajakan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat menyediakan kemudahan pembayaran melalui saluran pembayaran yang lebih mudah dijangkau masyarakat

seperti *e-commerce*, *e-wallet*, *mobile banking*, dan *internet banking*.

### 2.1.3 Rasio Efisiensi

Pada tabel 8, rasio efisiensi tahun 2020 sebesar 0,57 dan dikategorikan sangat efisien. Selanjutnya untuk tahun 2021, jumlah realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Adapun biaya pemungutan PAD mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga rasio efisiensi tahun 2021 naik menjadi 1,22 namun masih tergolong di kategori sangat efisien. Pada tahun 2022, jumlah realisasi PAD mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan biaya pemungutan PAD mengalami penurunan. Kondisi ini menghasilkan perhitungan rasio efisiensi untuk tahun 2022 sebesar 0,48 yang dikategorikan sangat efisien.

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Kab. Trenggalek TA. 2020 – 2022**

TA	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)	EK
2019	285.134.071.594,78	2.259.211.619,00	0,79	SE
2020	257.977.450.483,90	1.466.402.481,80	0,57	SE
2021	233.490.679.200,57	2.859.147.460,00	1,22	SE
2022	422.488.717.357,63	2.012.229.701,50	0,48	SE
<b>Rata-Rata</b>			<b>0,76</b>	<b>SE</b>

Catatan: EK: Efisiensi Keuangan, SE: Sangat Efisien

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019 – 2022

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk tahun 2020 – 2022 sebesar 0,76. Angka ini jika dirujuk pada tabel 5, berada di bawah 5% dan masuk ke kategori sangat efisien. Hasil dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah berada pada posisi yang optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu mencapai nilai realisasi PAD yang tinggi dengan diikuti biaya atau belanja yang rendah dalam memperolehnya. Tingkat efisiensi ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui minimalisasi belanja pemungutan PAD dan lebih mengalokasikan ke pos-pos anggaran belanja yang dampaknya dapat lebih

dirasakan oleh masyarakat dengan proporsi yang lebih besar.

### 2.1.4 Rasio Keserasian Belanja Daerah (Aktivitas)

Dari tabel 9, dapat diperoleh rasio keserasian belanja operasi untuk tahun 2020 sebesar 69,52%. Rasio ini menggambarkan kondisi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek didominasi oleh belanja operasi dengan proporsi di atas 50%. Untuk tahun 2021, jumlah realisasi belanja daerah mengalami penurunan namun, belanja operasi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sehingga rasio keserasian untuk tahun 2021 naik dibandingkan tahun 2020. Hasil perhitungan menunjukkan rasio keserasian tahun 2021 sebesar 72,01%. Selanjutnya untuk tahun 2022, belanja daerah mengalami kenaikan sekitar 17% dibanding tahun 2021. Kenaikan belanja daerah juga diikuti dengan kenaikan belanja operasi, namun kenaikannya tidak signifikan. Sehingga diperoleh rasio keserasian untuk tahun 2022 sebesar 61,99%.

**Tabel 9. Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Operasi Pemkab. Trenggalek TA.2020 – 2022**

TA	Realisasi		Rasio (%)
	Belanja Operasi	Belanja Daerah	
2019	1.345.375.690.444,79	1.756.534.679.311,55	76,59
2020	1.294.508.621.337,05	1.861.988.825.777,28	69,52
2021	1.324.984.026.591,36	1.840.127.791.074,27	72,01
2022	1.343.536.024.839,96	2.167.412.235.228,31	61,99
<b>Rata – rata</b>			<b>67,84</b>

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019 – 2022

**Tabel 10. Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemkab. Trenggalek TA.2020 – 2022**

TA	Realisasi		Rasio (%)
	Belanja Modal	Belanja Daerah	
2020	231.313.877.678,23	1.861.988.825.777,28	12,42
2021	238.767.153.102,56	1.840.127.791.074,27	12,98
2022	552.521.694.988,35	2.167.412.235.228,31	25,49
<b>Rata – rata</b>			<b>16,96</b>

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2020 – 2022

Dari tabel perhitungan di atas, dapat diperoleh rasio keserasian belanja modal untuk tahun 2020 sebesar 12,42%. Untuk tahun 2021, jumlah realisasi belanja daerah mengalami penurunan diikuti dengan kenaikan belanja modal dibanding tahun sebelumnya. Sehingga rasio keserasian

belanja modal untuk tahun 2021 naik dibandingkan tahun 2020. Hasil perhitungan menunjukkan rasio keserasian tahun 2021 sebesar 12,98%. Selanjutnya untuk tahun 2022, belanja daerah mengalami kenaikan sekitar 17% dibanding tahun 2021. Kenaikan belanja daerah juga diikuti dengan kenaikan belanja modal yang cukup signifikan. Sehingga diperoleh rasio keserasian untuk tahun 2022 sebesar 25,49%.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 dan tabel 8, rata-rata rasio keserasian belanja operasi untuk tahun 2020 – 2022 sebesar 67,84%. Adapun rata-rata rasio keserasian belanja modal untuk tahun 2020 – 2022 sebesar 16,96%. Rasio ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama tahun anggaran 2020 – 2022 lebih banyak dikelola untuk belanja rutin atau belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal. Belanja operasional Pemerintah Kabupaten Trenggalek diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, calon ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, serta belanja operasional kantor. Adapun belanja modal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek periode 2020 – 2022, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 18,43%. Dari hasil perhitungan rasio, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berada di kondisi kemampuan keuangan yang rendah sekali dan pola hubungan yang instruktif. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih jauh dari mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Analisis rasio efektivitas PAD secara keseluruhan menghasilkan rata-rata persentase sebesar 97,91%. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek cukup efektif dalam merealisasikan PAD karena hampir mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

3. Analisis rasio efisiensi secara keseluruhan menghasilkan rata-rata persentase sebesar 0,76%. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat efisien karena sudah optimal dalam memberikan efisiensi belanja atas pemungutan PAD, sehingga dapat mencapai realisasi PAD yang besar dengan diikuti pengeluaran belanja atau biaya pemungutan yang rendah.

4. Analisis rasio keserasian terhadap belanja operasi secara keseluruhan menghasilkan rata-rata persentase sebesar 67,84%. Hasil perhitungan rasio ini menggambarkan bahwa belanja daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek didominasi oleh belanja rutin.

5. Analisis rasio keserasian terhadap belanja modal secara keseluruhan menghasilkan rata-rata persentase sebesar 16,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan belanja pengembangan sarana prasarana masih belum optimal.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu merumuskan strategi-strategi dalam perumusan kebijakan dapat rangka optimalisasi potensi PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak eksternal. Utamanya terhadap sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terhadap wajib pajak dan wajib retribusi serta perlunya

- basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dimutakhirkan oleh data objek pajak PBB P2 pada kawasan yang strategis dan potensial.
2. Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan membuka peluang investasi bagi para investor baru yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Trenggalek dengan cara menawarkan beberapa keuntungan seperti penyediaan informasi yang lengkap terkait potensi dan peluang objek investasi, kemudahan proses perizinan, dan skema kerjasama lahan antara pemerintah daerah dengan investor.
  3. Optimalisasi PAD juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah terutama yang bersifat *idle* untuk kegiatan komersial seperti sewa untuk penyelenggaraan kegiatan maupun kegiatan usaha. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu merestrukturisasi BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD.
  4. Perlunya kerjasama antar SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Trenggalek untuk mendukung upaya optimalisasi PAD, terutama koordinasi antar instansi SKPD penghasil PAD. Hal ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan dalam pengelolaan PAD.
  5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan mengenai potensi dan kemampuan daerah untuk mencapai target pendapatan agar tingkat efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek meningkat.
  6. Melakukan analisis lebih mendalam terhadap prioritas belanja Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar lebih optimal dalam pelaksanaan belanja yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

### Daftar Pustaka

- Alhabsi, Ruqidul Hajah., Priyono, Nuwun., Bharata, Risma Wira. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 212 – 222. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>.
- Amal, M.I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4 (1), 83 – 93. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1723/904>.
- Dien, Astria Nur Jannah., Tinagon, Jantje. Walandouw, Stanley. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534 – 541.
- Firmansyah, A. & dkk. (2015). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH.
- Fitriandi, P. & dkk. (2020). *Bunga Rampai Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Marliani, Nenda. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 14 (1), 11-20. <http://ojs.stan->

- im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/84/55.
- Priadana, S. & S. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Putri, R.S.E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 5 (3), 2296 – 2313. [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23707-11\\_2402.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23707-11_2402.pdf).
- Rahmasari, A. G. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3), 77–86. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86> Pradipta, Z.V. 2017.
- Rahmawati, L., & Warsitasari, W.D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek di Masa Pandemi COVID-19 Periode 2020-2021. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10 (1), 339-354. <https://journal.feb-uniss.ac.id/index.php/home/article/download/35/30>.
- Ruqidul Hajah Alhabsi, Nuwun Priyono, & Risma Wira Bharata. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 212–222. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>